

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dapat disusun sesuai rencana.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2025, sesuai dengan pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 sebagai refleksi dan akuntabilitas evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2025 akan dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif, efisien, dan berdaya guna, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**HAFSAH HARAHAHAP, SKM  
PEMBINA IV/a  
NIP. 197509072010012016**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Data Organisasi.....	3
1.4 Sturuktur Organisasi.....	5
1.5 Aspek Strategis.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	8
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja.....	9
2.3 Strategi dan Kebijakan.....	10
2.4 Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	10
2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2 Realisasi Anggaran.....	21
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang.....	26
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel 1.....	4
Tabel 2.....	9
Tabel 3.....	10
Tabel 4.....	10
Tabel 5.....	12
Tabel 6.....	13
Tabel 7.....	14
Tabel 8.....	16
Tabel 9.....	18
Tabel 10.....	21

**LAMPIRAN**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025  
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan. Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 merujuk pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### 1.2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan, dimaksudkan untuk :

1. Sebagai Salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi Pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2025, dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong terwujudnya Kabupaten Labuhanbatu selatan yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Dapat digunakan sebagai media akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan yang menjadi acuan baku dan analisis lanjutan, mengarah pada sinergitas, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan acuan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan arah kebijakan mewujudkan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selatan.
4. LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini juga berorientasi sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berperan dan berfungsi maksimal memfasilitasi, merumuskan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu selatan.

### 1.3. Data Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 20 Tahun 2008, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**Tugas Pokok :**

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan umum pemerintahan Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

**Fungsi :**

- Perumusan dalam melaksanakan pembinaan Ideologi Pancasila;
- Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Kesatuan Bangsa, kebijakan dan pelaksanaan kesiapan/kesiagaan terhadap ancaman atau bencana;
- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran Bangsa, dan pelaksanaan penyelamatan dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman dan pencegahan, upaya pemadaman akibat kebakaran maupun penanggulangannya;
- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi;
- Perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- Evaluasi pelaksanaan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta pelaporannya;
- Melaksanakan hubungan kerjasama antara lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah;
- Pengendalian dan pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah;
- Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

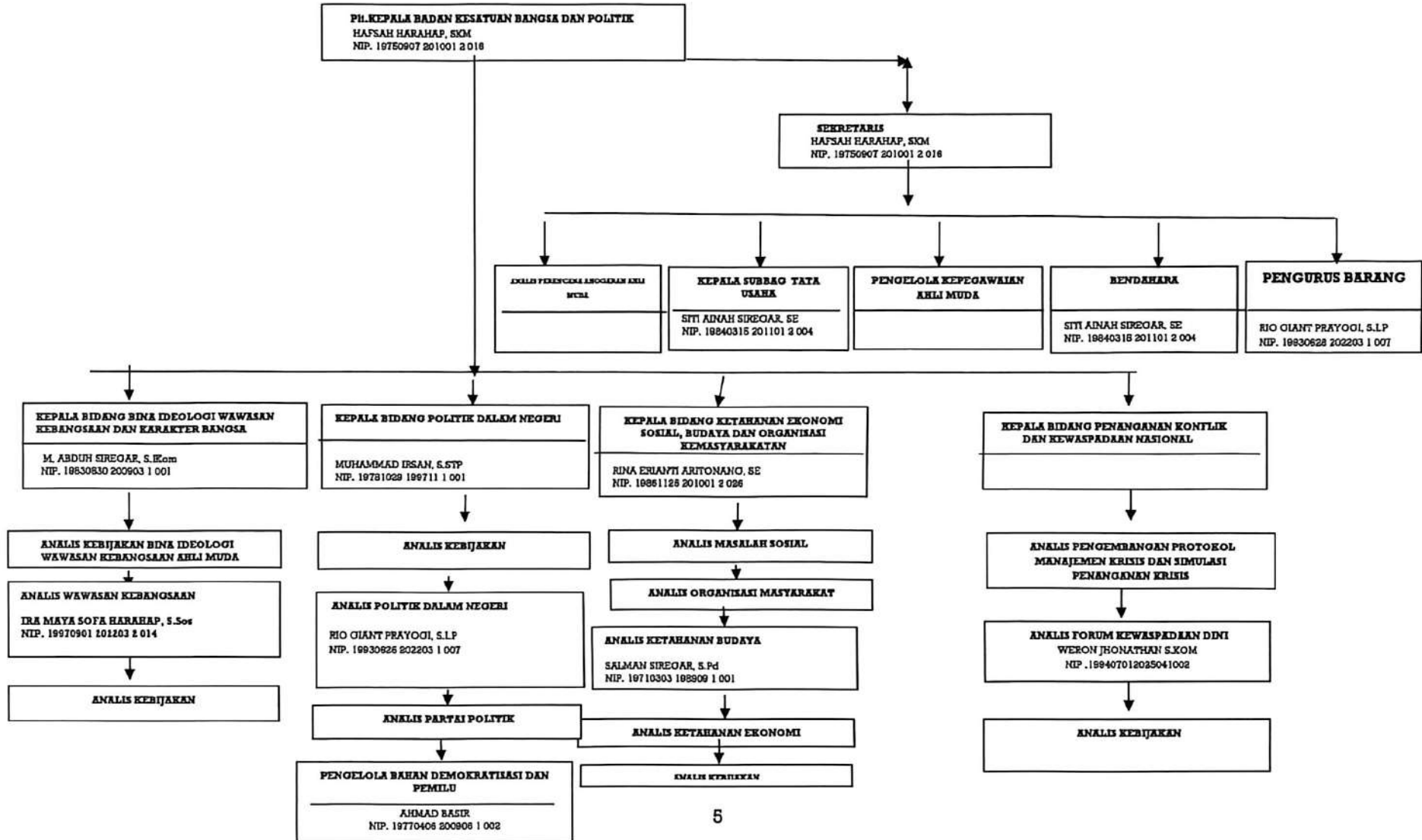
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan mempunyai sumber daya aparatur sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**SDM Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Golongan				Pendidikan						
		I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	S3
<b>1</b>	<b>Struktural</b>											
	Kepala Badan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	Kabid Penanganan Konflik dan Wawasan Nasional	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Kasubbag Umum	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Kabid Politik Dalam Negeri	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Kabid Ketahanan Ekonomi, sosial budaya dan Organisasi Masyarakat	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Kabid Bina Ideologi wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Analisis Ketahanan Budaya	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	Analisis Politik Dalam Negeri	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Analisis Wawasan Kebangsaan	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	Analisis Forum Kewaspadaan Dini			1						1		
<b>2</b>	<b>PPPK / PPPK PW</b>	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-
<b>3</b>	<b>Honoror/PBPNS</b>	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
	<b>Jumlah Pegawai</b>	-	1	6	5	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	-

## 1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :



### 1.5. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama Organisasi

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah. Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Saat ini dirasakan bahwa didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi cenderung mengalami surplus kebebasan, namun pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai dengan antara lain memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang terjadi merupakan irisan dari berbagai masalah yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya, dimana setiap konflik memiliki karakter local yang kental dan kadang kala bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebabnya adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal.

Menghadapi kondisi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Peran strategis tersebut dapat lihat dalam implementasi program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik telah berjalan cukup baik, namun ada beberapa kendala/permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

#### A. Faktor Internal

- Terbatasnya kualitas sumber daya manusia.
- Adanya jabatan structural yang belum terisi.

- Terbatasnya anggaran.

#### B. Faktor Eksternal

- Masyarakat belum cerdas secara politik.
- Kemajuan teknologi komunikasi dapat menimbulkan gangguan keamanan.
- Terjadinya krisis akhlak dan krisis moral akibat diabaikannya nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber etika berbangsa dan bernegara.
- Maraknya kasus narkoba yang merupakan ancaman terhadap kelangsungan kehidupan bangsa.
- Banyaknya ormas dan LSM yang orientasinya hanya sekedar mendapatkan SKT, sehingga pelaksanaan monitoring tidak maksimal diakibatkan tidak terdeteksinya keberadaan ormas/LSM tersebut.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Organisasi**

##### **Visi dan Misi Kepala Daerah :**

###### **Visi**

**"Labuhanbatu Selatan Yang Semakin Modern"**

###### **Misi**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Labuhanbatu selatan yang Transformasi sosialnya diwujudkan untuk membangun SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing yang hebat.
2. Labuhanbatu selatan yang Transformasi ekonominya diwujudkan untuk membangun perekonomian yang kuat, inklusif, dan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Labuhanbatu selatan yang Transformasi tata kelola pemerintahannya memberikan pelayanan prima dan memiliki birokrasi yang bersih, lincah, serta responsif.
4. Labuhanbatu selatan yang wilayahnya aman, tentram, damai, dan nyaman untuk hidup maupun beraktivitas.
5. Labuhanbatu selatan yang pembangunannya untuk menciptakan lingkungan yang lestari dan berbudaya.
6. Labuhanbatu selatan yang pembangunan wilayahnya merata, adil, dan menciptakan produk keunggulan daerah yang berkualitas tinggi.
7. Labuhanbatu selatan yang pembangunannya ditujukan untuk sarana dan prasarana serta infrastruktur publik yang berkualitas, memadai dan merata.
8. Labuhanbatu selatan yang pembangunannya berkesinambungan, berkeadilan, bermartabat.

Visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

###### **A. Visi**

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat diformulasikan sebagai berikut :

**" Labuhanbatu selatan Aman, Tentram dan Partisipasi Politik Meningkat "**

Penjabaran dari visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan adalah sebagai berikut :

“Aman” adalah masyarakat Labuhanbatu selatan dapat menjalankan aktivitasnya dengan tertib, nyaman dan tanpa rasa takut.

“Tenram” adalah setiap masyarakat hidup rukun dan damai ditengah-tengah masyarakat yang beragam suku bangsa dan agama.

“Partisipasi Politik” adalah keterlibatan warga dalam tahapan kebijakan, termasuk juga peluang untuk ikutserta dalam pelaksanaan keputusan.

#### B. Misi

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan dapat diformulasikan sebagai berikut :

Misi Kesatu : Terciptanya ketertiban, keamanan dan nyaman lingkungan.

Misi Kedua : Terciptanya masyarakat yang berwawasan kebangsaan.

Misi Ketiga : Terwujudnya masyarakat bebas dari penyakit masyarakat.

Misi Keempat: Terwujudnya masyarakat yang sadar politik.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya lingkungan yang tertib dan tenram.
2. Terciptanya masyarakat yang berwawasan kebangsaan.
3. Terwujudnya masyarakat bebas dari penyakit masyarakat.
4. Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik.

#### 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dengan menjelaskan sesuatu yang akan dicapai. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang secara terukur akan dicapai secara signifikan. Adapun tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,	Konsistensi Penyusunan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	Capaian Penyusunan Dokumen SAKIP

	Transparan dan Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor	Capaian Penyusunan Laporan Keuangan
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor
			Cakupan Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi dengan baik
2	Terwujudnya Kesejahteraan serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Siswa yang mendapatkan Sosialisasi tentang Bahaya Penyalagunaan Narkoba di Sekolah.
			Persentase Penanganan Konflik Sosial dan Ormas di Daerah
			Persentase Kcsadaran Politik Masyarakat dalam Menggunakan Hak Politik pada Pemilu/ Pilkada
3	Terwujudnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang berwawasan Kebangsaan dan Berdemokrasi	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Wawasan Kebangsaan	Persentase Etnis/Suku/Agama/Ormas dan LSM yang Mendapatkan Sosialisasi Tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

### 2.3 Strategi dan Kebijakan.

Dalam upaya mencapai tujuan, disusun strategi dan kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Strategi dan Kebijakan**

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Pengutan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Menyusun Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2	Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	Menyusun Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3	Meningkatkan Perberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Menyusun Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4	Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik, serta Etika Budaya Politik Masyarakat	Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

5	Meningkatkan Penyelesaian Konflik di Wilayah	Menyusun Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Sosial
---	--	---

#### 2.4 Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana kinerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan pada Tahun Anggaran 2025 disusun dengan jumlah urusan sebanyak 1 urusan yaitu Unsur Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 6 Program dan 13 Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Rencana Kinerja**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 / Bulan
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penetausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Bahan Logistik kantor	1 Paket
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Izin Kendaraan Dinas jabatan	1 Unit
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Izin Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	4 Unit
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit
13	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan Paskibraka	10 Orang

14	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Orang
15	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika	1 Laporan
16	Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang
17	Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan
18	Program Perbedayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang
18	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Orang
19	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Orang

20	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
----	--	---	-----------

## 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Bupati Labuhanbatu selatan) kepada penerima amanah (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Perjanjian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tenaga Aparatur yan berkualitas	Tersedianya Aparatur yang berkualitas	100 %
2	Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terciptanya kesadaran Masyarakat, keamanan dan kenyamanan Lingkungan	100 %
3	Terwujudnya Wawasan Kebangsaan	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama dan Pembauran Kebangsaan	100 %
4	Terwujudnya Pilkada yang aman, bebas dan kondusif	Terlaksananya Pemilihan Umum yang aman, kondusif	100 %
5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terwujudnya Buka Puasa bersama Tokoh Masyarakat dan Ormas	100 %
6	Terwujudnya Pemberdayaan Menjaga ketertiban dan Keamanan Lingkungan	Terbentuknya Tim Penanganan Gangguan Keamanan dan Tim Desk Pilpres	100 %

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapat alokasi dana tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 7.240.272.209,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan dalam 6 (Enam) program sebagai berikut:

**Tabel 6**

**Program Anggaran**

NO	PROGRAM	PELAKSANA	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	Rp. 2.934.485.453
2	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bina Ideologi wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	Rp. 1.572.131.104
3	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Bidang Politik Dalam Negeri	Rp. 1.978.101.655
4	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial budaya dan Organisasi Masyarakat	Rp. 292.336.512
5	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial budaya dan Organisasi Masyarakat	Rp. 194.382.322
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bidang Penanganan Konflik dan Wawasan Nasional	Rp. 268.835.163
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>Rp. 7.240.272.209</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 / Bulan	15 / Bulan	72,67

2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	96,96
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penetausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	78,20
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Bahan Logistik kantor	1 Paket	1 Paket	97
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	1 Laporan	97,70
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	71,01
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	67,57
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	71,01
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Izin Kendaraan Dinas jabatan	1 Unit	1 Unit	97,32
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Izin Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	4 Unit	4 Unit	95,62
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	96,50
13	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pembentukan Paskibraka	10 Orang	10 Orang	85,55
14	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 Orang	10 Orang	79,84
15	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	1 Laporan	1 Laporan	75,05

		Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika			
16	Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	10 Orang	99,82
17	Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	94,54
18	Program Perbedayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	10 Orang	97,24
18	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Orang	10 Orang	80,66

10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Orang	10 Orang	66,54
20	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	81,83

Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan lingkungan yang tertib dan tentram telah menunjukkan capaian kinerja yang positif yang ditunjukkan oleh rata-rata capaian kinerjanya sebesar 83,65 %. Capaian kinerja dari sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya lingkungan yang tertib dan tentram menunjukkan keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025.

















Tabel 9  
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025	Target Renstra					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Konsistensi Penyusunan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	-
		RKA, DPA, DPPA dan dokumen pengelolaan keuangan OPD lainnya.	100	100	100	100	100	100	-
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja OPD	100	100	100	100	100	100	-
2	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor	Laporan EKPPD, LKjIP dan LKJP OPD	100	100	100	100	100	100	-
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	-
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	100	100	100	100	-
3	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD yang baik	100	100	100	100	100	100	-
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran OPD yang baik	100	100	100	100	100	100	-
		Pakaian Dinas serta Perlengkapannya	100	100	100	-	-	-	-

4	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor	Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik	100	100	100	100	100	100	-
		Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	100	100	100	100	100	100	-
		Tersedianya Bahan Logistik kantor	100	100	100	100	100	100	-
		Tersedianya Cetakan dan Penggandaan	100	100	100	100	100	100	-
		Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	100	100	100	100	100	-
5	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor	Tersedianya Administrasi Surat-Menyurat	100	100	100	100	100	100	-
		Tersedianya Rekening Air, Listrik dan telepon	100	100	100	100	100	100	-
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100	100	100	100	-
6	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor	Tersedianya Pemeliharaan dan Izin Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	100	100	100	100	-
		Tersedianya Pemeliharaan dan Izin Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	100	100	100	100	100	100	-
		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100	100	100	100	-

7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Wawasan Kebangsaan	Kegiatan-kegiatan Upacara Bela Negara dan Hari-hari Besar Lainnya	100	100	100	100	100	100	-
8	Meningkatnya Kesejahteraan serta Perlindungan Masyarakat	Tercapainya Dokumen LPJ Bantuan Partai Politik yang Efektif dan Efisien	100	100	100	100	100	100	-
		Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	100	100	100	100	100	100	-
9	Meningkatnya Kesejahteraan serta Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Ormas yang berkualitas di daerah	100	100	100	100	100	100	-
		Terlaksananya Monitoring Keberadaan ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	100	100	100	100	100	-
10	Meningkatnya Kesejahteraan serta Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya masyarakat, Ormas, Etnis, Suku dan Agama yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	100	100	100	100	100	100	-
11	Meningkatnya Kesejahteraan serta Perlindungan Masyarakat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	-

Capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja secara rata-rata mengalami penurunan yang berfluktuasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Berikut analisis capaian kinerja :

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan :

- Terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
- Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertampung pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang akan mendukung tercapainya target capaian kinerja.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

- Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sarana dan prasana yang ada sehingga target capaian kinerja dapat terwujud.

c. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sehingga masalah yang ada dapat terselesaikan.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2025**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET ( Rp. )	REALISASI ( Rp. )	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.285.525.692	1.649.441.387	72,16
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.865.518	24.110.000	96,96

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.280.000	20.280.000	100
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya kelengkapannya	0	0	0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.128.019	15.645.000	97,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.429.090	113.966.396	97,88
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.268.053	9.632.600	67,51
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.046.065	249.285.000	71,01
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.420.000	38.399.008	99,94
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.398.450	53.928.222	95,62
		Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	6.010.000	5.800.000	96,50
8	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000	0	0
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi	562.049.728	448.788.480	79,84

		Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	33.688.512	25.284.740	75,05
		Pembentukan Paskibraka	926.392.864	792.547.000	85,55
9	Pengkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.738.100.431	1.735.050.000	99,82
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	240.001.224	226.920.000	94,54
10	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	292.336.512	284.281.400	97,24

		Ormas Asing di Daerah			
11	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	194.382.322	156.797.600	80,66
12	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	116.029.482	77.208.000	66,54
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	152.805.681	125.053.600	81,83

**KEBUTUHAN DATA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (2025)	CAPAIAN (2025)	FAKTOR PENYEBAB TERCAPAINYA/TIDAK TERCAPAINYA TARGET	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuda/Pelajar, Partai Politik, Forum dan lembaga kemasyarakatan seperti FKUB, FKDM, dan FPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	%	100	85	a. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik ; Pelayanan informasi, konsultasi, dan fasilitasi di bidang kesatuan bangsa dan politik belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur ; Jumlah dan kompetensi aparatur yang terbatas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2		Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan	%				



3		<p>Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	%	<p>anggaran yang terbatas berdampak pada pelaksanaan program pelayanan, sosialisasi, dan pembinaan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.</p>
4		<p>Jumlah orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat</p>	%	<p>d. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal : Koordinasi dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan masih memerlukan penguatan untuk mendukung efektivitas pelayanan. e. Dinamika Sosial dan Politik yang Kompleks</p>

5		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			:Perkembangan isu sosial dan politik yang cepat menuntut respon pelayanan yang lebih adaptif dan berbasis data.
		Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			<p>f. Penyebaran Informasi Negatif dan Hoaks : Maraknya informasi negatif dan hoaks berpotensi mengganggu stabilitas daerah dan menjadi tantangan dalam pelayanan edukasi politik dan wawasan kebangsaan.</p> <p>g. Terbatasnya Pemanfaatan Teknologi Informasi : Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung</p>

					pelayanan publik dan penyebaran informasi masih belum optimal.
--	--	--	--	--	--

Adapun indikator kinerja utama (IKU) yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 – 2029 adalah :

- Mengukur dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia agar kebebasan, hak politik masyarakat, dan kinerja lembaga pemerintahan berjalan dengan baik
- Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang cukup toleran dan saling menghormati antar umat beragama.

Kotapinang, Januari 2026

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Labuhanbato Selatan



HAFSAH HARAHAP, SKM  
PEMBINA (IV/a)

NIP. 197509072010012016

## **BAB IV P E N U T U P**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang membeikan amanah dan pewujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan Tahun 2025. LKiP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang tepat berkesinambungan.

Simpulan hasil pengukuran kinerja dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat baik
- b. 76 % sampai 100 % = Baik
- c. 56 % sampai 75 % = Cukup
- d. Kurang dari 55 % = Kurang

Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2025 rata – rata capaian kinerja bernilai baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan tetap memiliki dedikasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Dalam hal ini masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Minimnya kompetensi dan sumber daya aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu selatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;

2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengoptimalan pencapaian kinerja;
3. Masih kurangnya arah kebijakan dalam hal pelaksanaan anggaran untuk pencapaian sasaran;
4. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan.

#### 4.2 **Langkah Strategis Penguatan Capaian Kinerja Masa Mendatang**

Dengan adanya kendala-kendala tersebut diatas maka dilakukan upaya untuk mengatasinya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Menyusun rencana kebijakan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada masa anggaran tahun berikutnya;
3. Meningkatkan arah kebijakan dalam hal pencapaian sasaran secara optimal;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan.



**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**HAFSAH HARAHAHAP, SKM  
PEMBINA IV/a  
NIP. 197509072010012016**